



90/21  
1

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270**

Nomor : PW/00774 /DPR RI/2021  
Sifat : Penting  
Derajat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Penugasan untuk Membahas RUU  
tentang Praktik Psikologi

Januari 2021

Yth. Pimpinan Komisi X DPR RI

Jakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2021, telah membicarakan surat masuk dari Presiden RI Nomor: R-48/Pres/12/2020, tanggal 10 Desember 2020, hal: Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.

Dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah menyetujui pembahasan RUU tentang Praktik Psikologi tersebut **diserahkan kepada Komisi X DPR RI** dan apabila pembahasan telah selesai, maka diharapkan untuk segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam,

M. Azis Syamsuddin

Tembusan:

1. Pimpinan DPR RI;
2. Sekretaris Jenderal DPR RI;
3. Deputi Bidang Persidangan;
4. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan;
5. Kepala Biro Persidangan I;
6. Kepala Bagian Set. Komisi X.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Desember 2020

Nomor : R-48/Pres/12/2020  
Sifat : Sangat segera  
Hal : Penunjukan wakil Pemerintah untuk  
membahas Rancangan Undang-  
Undang tentang Praktik Psikologi

Kepada Yth.  
**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
di  
Jakarta

Merujuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor LG/12100/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 hal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menugaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili kami dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



JOKO WIDODO

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
8. Menteri Kesehatan
9. Menteri Sosial
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia